

## Analisis kelayakan pembangunan Balai Latihan Kerja Provinsi Papua Tengah di Distrik Wanggar, Nabire

Arkam<sup>1\*</sup>, Wahyu Atiq Widiatoro<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas Teknik dan Konservasi, Universitas Muhammadiyah Berau

Jl. Dr. Murjani II, Kelurahan Karang Ambun Berau, Kalimantan Timur, Indonesia. 111030

\*E-mail: [arkam@umberau.ac.id](mailto:arkam@umberau.ac.id)

**Abstrak:** Balai Latihan Kerja (BLK) merupakan lembaga pelatihan yang dibutuhkan bagi masyarakat di Provinsi Papua Tengah. Pembangunan BLK ditujukan untuk mempersiapkan masyarakat di Provinsi Papua Tengah untuk menjadi tenaga kerja lokal kompeten dan profesional dalam menghadapi persaingan tenaga kerja asing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan pembangunan BLK dengan mempertimbangkan aspek ketenagakerjaan, demografi, geografi, ekonomi, hukum, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan manajemen. Penelitian ini dilakukan di Distrik Wanggar Kabupaten Nabire. Hasil penelitian meliputi dominasi pekerja di sektor informal, jumlah penduduk terus meningkat, lokasi BLK berada pada dataran rendah, bangunan BLK merupakan bangunan gedung milik negara, BLK menjadi sarana pemberdayaan masyarakat, pengembangan sektor basis untuk mendukung pembangunan BLK, penggunaan teknologi *virtual reality* dan *augmented reality* pada simulator, dan pembukaan kejuruan di BLK Provinsi Papua Tengah mempertimbangkan potensi lokal serta kebutuhan pasar kerja, dengan fokus pada pertanian, perikanan, teknik, industri kreatif, teknologi informasi, dan kesehatan. Kesimpulan pembangunan BLK layak dilakukan dengan 7 parameter yang dianalisis, di lokasi Distrik Wanggar Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.

**Kata Kunci:** analisis kelayakan bangunan, balai latihan kerja, Papua Tengah, pembangunan infrastruktur

**Abstract:** The Job Training Center (JTC) is a training institution needed by the community in Central Papua Province. The development of JTC is intended to prepare the community in Central Papua Province to become competent and professional local workers in facing competition from foreign workers. This study aims to determine the feasibility of developing JTC by considering aspects of employment, demographics, geography, economy, law, socio-culture, science and technology, and management. This study was conducted in Wanggar District, Nabire Regency. The results of the study include the dominance of workers in the informal sector, the population continues to increase, the location of JTC is in the lowlands, the BLK building is a state-owned building, JTC is a means of community empowerment, development of base sectors to support the development of JTC, the use of virtual reality and augmented reality technology in simulators, and the opening of vocational programs at JTC Central Papua Province considering local potential and labor market needs, with a focus on agriculture, fisheries, engineering, creative industries, information technology, and health. The conclusion is that the development of JTC is feasible with 7 parameters analyzed, in the location of Wanggar District, Nabire Regency, Central Papua Province.

**Keywords:** building feasibility analysis, job training center, Central Papua, infrastructure development

### PENDAHULUAN

Pelatihan kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, merupakan keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Pelatihan berbasis kompetensi

Cara Sitasi:

Arkam, A., Widiatoro, W. A. (2025). Analisis kelayakan pembangunan Balai Latihan Kerja Provinsi Papua Tengah di Distrik Wanggar, Nabire. *Teknosains: Media Informasi dan Teknologi*, 19(1), 76-87. <https://doi.org/10.24252/teknosains.v19i1.55379>

Diajukan 10 Februari 2025; Ditinjau 24 April 2025; Diterima 14 Juni 2025; Diterbitkan 14 Juni 2025  
Copyright © 2025. The authors. This is an open access article under the CC BY-SA license

(*competency based training*) merupakan suatu kegiatan untuk memberikan pelatihan kepada seseorang yang diprioritaskan kepada beberapa aspek seperti pengetahuan, kemampuan dan sikap profesional (afektif, kognitif dan psikomotorik). Dengan adanya program *competency based training* diharapkan mampu mencapai hasil kerja yang optimal bagi individu agar terampil dalam bidang yang ditekuninya sesuai dengan aturan yang berlaku. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Sumber Daya Mineral, berupaya meningkatkan kualitas kinerja masyarakat untuk menghadapi persaingan kerja dengan tenaga kerja asing. Jika tenaga kerja lokal tidak memiliki kompetensi yang disarankan, maka daerah ini hanya akan menjadi pasar tenaga kerja tetapi tidak dapat ikut serta dalam berkompetisi. Pembangunan Balai Latihan Kerja ditujukan untuk mempersiapkan warga masyarakat khususnya di Papua Tengah untuk menjadi tenaga kerja lokal yang kompeten dan profesional dalam menghadapi persaingan dengan tenaga kerja asing.

Berdasarkan data angkatan kerja di Papua Tengah, sebagaimana terlihat bahwa penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Papua Tengah. Penduduk usia kerja pada Tahun 2024 sebanyak 1.091.275 orang. Sebagian besar penduduk usia kerja tersebut merupakan angkatan kerja yaitu sebesar 76,99 persen (840.214 orang), dan sisanya termasuk bukan angkatan kerja yaitu sebesar 23,01 persen (251.061 orang). Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Komposisi angkatan kerja pada Tahun 2024 terdiri dari 819.313 penduduk yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan 20.901 penduduk pengangguran.

Kondisi angkatan kerja tersebut diatas mengindikasikan pentingnya lembaga yang menjadi wadah pelatihan bagi angkatan kerja di wilayah Papua Tengah. Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai salah satu instrumen peningkatan kompetensi tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam mentransformasikan pengetahuan, keterampilan dan etos kerja produktif, dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Sejalan dengan perubahan teknologi informasi dan sistem produksi yang begitu cepat di lingkungan industri, telah mendorong perubahan kualifikasi keterampilan tenaga kerja dengan tingkat kompetensi yang semakin tinggi. Oleh karena itu, agar lulusan lembaga pelatihan dapat terserap di pasar kerja, lembaga pelatihan dituntut untuk merubah paradigma dari pelatihan konvensional (*supply driven*) yang bersifat birokratis, sentralistis serta berorientasi pada proyek, menuju pelatihan yang fleksibel, kompetitif, responsif serta berorientasi pada kebutuhan pasar kerja (*demand driven*) dan mampu mendayagunakan sumberdaya pelatihan secara efisien dan efektif. Untuk menjaga eksistensi dan pertumbuhannya, maka lembaga pelatihan kerja tidak lagi cukup mengandalkan sumber-sumber konvensionalnya, tetapi harus mampu menggali, mendayagunakan dan mengembangkan sumber-sumber dan peluang baru yang menjamin tersedianya sumber keuangan untuk mendanai operasional pelatihan.

Kelayakan pembangunan BLK perlu diketahui dan diteliti lebih lanjut, karena hingga saat ini, belum ada kajian komprehensif yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, hukum, dan spasial dalam penentuan kelayakan lokasi BLK di Papua Tengah. Penelitian kelayakan pembangunan BLK di Papua Tengah belum ada. Beberapa penelitian mengenai kelayakan pembangunan BLK lebih berfokus pada kajian aspek kelayakan bisnis.

Berdasarkan uraian latar belakang maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan lokasi pembangunan balai latihan kerja berdasarkan aspek ketenagakerjaan, aspek demografi, aspek kondisi geografi, aspek hukum, aspek sosial dan budaya, aspek ekonomi, aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, dan aspek manajemen. Kelayakan aspek tersebut menjadi dasar dalam membangun dan mengembangkan pelatihan ketenagakerjaan di wilayah Papua Tengah, sehingga penelitian ini berkontribusi langsung terhadap hal tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Lokasi penelitian di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian praktis atau terapan (*applied research*) yang bertujuan untuk menentukan kemungkinan atau kelayakan suatu proyek, program atau kegiatan. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder melalui studi dokumen atau kepustakaan, dan data primer melalui pengamatan langsung di lapangan. Terdapat beberapa teknik analisis yang digunakan seperti analisis deskriptif dan statistik dengan persamaan berikut ini:

1. Proyeksi penduduk dengan menggunakan metode proyeksi eksponensial:

$$P_n = P_0 e^{rt}$$

Keterangan:

- $P_n$  = Jumlah penduduk setelah n tahun ke depan  
 $P_0$  = Jumlah penduduk pada tahun awal  
 $r$  = Angka pertumbuhan penduduk  
 $n$  = Jangka waktu dalam tahun  
 $e$  = Bilangan eksponensial = 2,7182818

2. *Location Quotient (LQ)*

$$\text{Pendekatan Tenaga Kerja: } LQ = \frac{L_i/L_t}{N_i/N_t}$$

$$\text{Pendekatan Nilai Tambah/Pendapatan: } LQ = \frac{V_i/V_t}{Y_i/Y_t}$$

Keterangan:

- $L_i$  = Jumlah tenaga kerja sektor i pada tingkat wilayah yang lebih rendah.  
 $L_t$  = Total tenaga kerja pada tingkat wilayah yang lebih rendah.  
 $N_i$  = Jumlah tenaga kerja sektor i pada tingkat wilayah yang lebih diatas.  
 $N_t$  = Total tenaga kerja pada tingkat wilayah yang lebih diatas.  
 $V_i$  = Nilai PDRB sektor i pada tingkat wilayah yang lebih rendah.  
 $V_t$  = Total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih rendah.  
 $Y_i$  = Nilai PDRB sektor i pada tingkat wilayah yang lebih atas.  
 $Y_t$  = Total PDRB pada tingkat wilayah yang lebih atas.

Jika hasil perhitungan di formulasi di atas menghasilkan:

1.  $LQ > 1$ , artinya, komoditas itu menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan. Komoditas memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan di wilayah bersangkutan akan tetapi juga dapat diekspor ke luar wilayah.
2.  $LQ = 1$ , Komoditas itu tergolong non-basis, tidak memiliki keunggulan komparatif. Produksinya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk diekspor.
3.  $LQ < 1$ , Komoditas ini juga termasuk non-basis. Produksi komoditas di suatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan atau impor dari luar.

3. SWOT Analysis

Tabel 1. Tabel SWOT analysis

		EXTERNAL FACTOR	
		Opportunity	Threat
INTERNAL FACTOR	Identification Of Factor	Tentukan faktor-faktor Peluang S Vs O	Tentukan faktor-faktor ancaman S Vs T
	Strength (S) kekuatan faktor-faktor	Tentukan program yang muncul dengan mempertemukan kekuatan (S) dengan Peluang (O)	Tentukan program yang muncul dengan mempertemukan Kekuatan dengan ancaman
	Weakness (W) kelemahan faktor-faktor	W Vs O Tentukan program yang muncul dengan mempertemukan kelemahan (W) dengan Peluang (O)	W Vs T Tentukan program yang muncul dengan mempertemukan kelemahan (W) dengan ancaman (T)

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Analisis Kondisi Ketenagakerjaan**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan, “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, sesudah masa kerja.” Berdasarkan definisi tersebut, dan dihubungkan dengan jumlah angkatan kerja di Provinsi Papua Tengah pada Tahun 2024 sebanyak 840,21 ribu orang. Dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas sebesar 1.091,27 ribu orang, maka tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 76,99 persen. Penduduk yang bekerja sebanyak 819,31 ribu orang. Lapangan pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Pada Tahun 2024, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja sebesar 656,94 ribu orang (80,18 persen). Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; pengadaan listrik dan gas; informasi dan komunikasi; real estat; jasa perusahaan; jasa keuangan dan asuransi; jasa lainnya; industri pengolahan; dan penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan sektor-sektor yang menyerap tenaga kerja kurang dari satu persen. Sebanyak 96,69 ribu orang (11,80 persen) bekerja pada kegiatan formal, sisanya sebesar 722,62 ribu orang (88,20 persen) merupakan pekerja kegiatan informal. Jumlah setengah penganggur sebanyak 51,43 ribu orang, sementara pekerja paruh waktu sebesar 382,51 ribu orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) Februari 2024 sebesar 2,49 persen atau sebanyak 20,90 ribu orang.

**B. Analisis Demografi**

1. Pertumbuhan penduduk

Laju pertumbuhan penduduk mengidentifikasi kecenderungan besarnya penduduk pada waktu mendatang. Jumlah penduduk di Provinsi Papua Tengah pada tahun 2021 sebanyak 1.404.574 jiwa dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 1.404.787 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2024 yaitu 1,20%. Data pertumbuhan penduduk ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 1. Pertumbuhan penduduk di Provinsi Papua Tengah tahun 2021-2023

Kabupaten di Provinsi Papua Tengah	Penduduk (Jiwa)			Laju Pertumbuhan
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
Kabupaten Mimika	316.295*	316.295*	313.016	0,73
Kabupaten Dogiyai	117.818	119.815	122.993	2,65
Kabupaten Deiyai	100.466	102.168	102.168	1,85
Kabupaten Nabire	170.914	173.043	174.427	0,17
Kabupaten Paniai	223.467	227.254	227.254*	1,38
Kabupaten Intan Jaya	135.043	135.043*	135.043*	-
Kabupaten Puncak	116.044	117.359	117.359*	1,13
Kabupaten Puncak Jaya	224.527	224.527*	224.527*	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.404.574</b>	<b>1.415.504</b>	<b>1.416.787</b>	<b>1,20</b>

Sumber: Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Dalam Angka, Tahun 2024

Keterangan: \*Data jumlah penduduk mengacu pada tahun sebelumnya

## 2. Proyeksi penduduk

Proyeksi penduduk Provinsi Papua Tengah menggunakan metode eksponensial, dengan asumsi bahwa penambahan penduduk yang terjadi secara sedikit-sedikit sepanjang tahun, berbeda dengan metode geometri yang mengasumsikan bahwa penambahan penduduk hanya terjadi pada satu saat selama kurun waktu tertentu. Berikut ini hasil proyeksi penduduk Provinsi Papua Tengah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang, dengan menggunakan metode eksponensial.

Tabel 2. Proyeksi penduduk di Provinsi Papua Tengah tahun 2024-2043

Kabupaten di Provinsi Papua Tengah	Penduduk (Jiwa)			
	Tahun 2024-2028	Tahun 2029-2033	Tahun 2034-2038	Tahun 2039-2043
Kabupaten Mimika	339.018	363.373	389.478	417.459
Kabupaten Dogiyai	130.419	141.961	154.525	168.201
Kabupaten Deiyai	111.205	121.042	131.749	143.402
Kabupaten Nabire	184.171	196.014	208.618	222.034
Kabupaten Paniai	247.362	269.250	293.075	319.007
Kabupaten Intan Jaya	162.636	189.969	221.895	259.187
Kabupaten Puncak	124.205	131.450	139.118	147.233
Kabupaten Puncak Jaya	224.527	224.527	224.527	224.527
<b>Jumlah</b>	<b>1.523.543</b>	<b>1.637.586</b>	<b>1.762.986</b>	<b>1.901.051</b>

Dengan jumlah penduduk sekitar 1.901.051 jiwa hingga tahun 2043, Provinsi Papua Tengah memiliki basis tenaga kerja yang besar. Populasi yang besar ini menciptakan kebutuhan untuk mempersiapkan individu agar siap memasuki pasar kerja. BLK dapat berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan pelatihan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan *employability* penduduk. Pembangunan BLK juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Papua Tengah. Dengan meningkatkan keterampilan masyarakat, BLK dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru.

## C. Analisis Kondisi Geografi

### 1. Letak wilayah

Kajian terhadap kondisi geografis wilayah Provinsi Papua Tengah, kaitannya dengan rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Papua Tengah yang berada di Kabupaten Nabire, adalah untuk mengetahui keadaan geografis wilayah dan peluang akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan pusat pelatihan ketenagakerjaan di wilayah ini sebagai peluang mengembangkan diri dan membekali diri dengan

keterampilan sesuai dengan minat dan peluang kerja yang menjadi sasaran para peserta pelatihan dimasa mendatang. Mengingat wilayah Provinsi Papua Tengah dengan jumlah kabupaten sebanyak 8 (delapan) wilayah otonom, tentunya menjadi peluang pengembangan Balai latihan Kerja (BLK) dimasa mendatang.



Gambar 1. Peta administrasi wilayah Provinsi Papua

Berdasarkan data Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial, Provinsi Papua Tengah memiliki luas wilayah sebesar 6.108.947,42 Ha dengan Ibukota Provinsi berada di Kabupaten Nabire.

Tabel 3. Wilayah Provinsi Papua Tengah dirinci tiap kabupaten

Kabupaten	Ibukota	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persen (%)
Mimika	Timika	18.298,95	29,96
Dogiyai	Kigamani	3.792,93	6,21
Deiyai	Tigi	2.846,41	4,66
Nabire	Nabire	11.806,09	19,33
Paniai	Enarotali	5.306,87	8,69
Intan Jaya	Sugapa	5.334,45	8,73
Puncak	Ilaga	7.701,03	12,61
Puncak Jaya	Mulia	5.986,19	9,80
Papua Tengah	Nabire	61.072,92	100,00

Sumber: Provinsi Papua Tengah Dalam Angka, Tahun 2024

## 2. Ketersediaan Balai Latihan Kerja

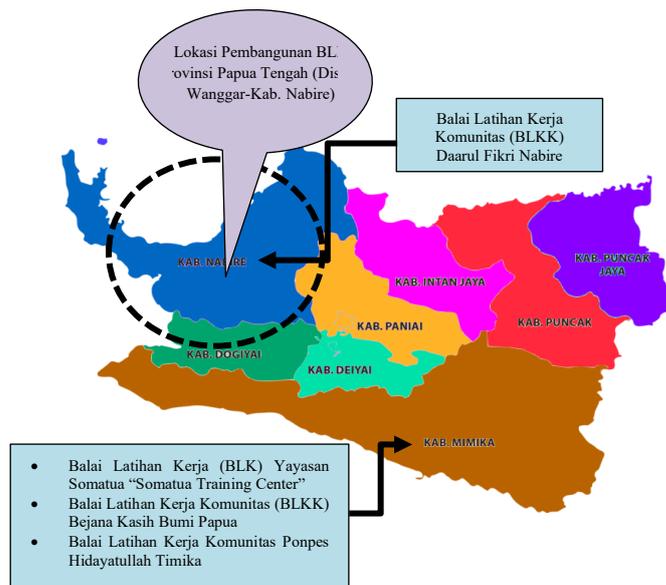
BLK di wilayah Provinsi Papua Tengah, terdapat di 2 (dua) wilayah, yaitu Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Nabire. BLK ini menyelenggarakan berbagai pelatihan kejuruan seperti teknik manufaktur, teknik otomotif, teknologi informasi (IT), teknik listrik, teknik bangunan, teknik las, garmen apparel, tata kecantikan, tata busana, pariwisata, pertanian, perikanan, industri kreatif bidang TIK, industri dan lain-lain.

Tabel 4. Daftar Balai Latihan kerja (BLK) yang ada di Provinsi Papua Tengah, Tahun 2024

Nama Balai Latihan Kerja	Program Training	Lokasi
Balai Latihan Kerja (BLK) Yayasan Somatua "Somatua Training Center"	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mekanik</li> <li>Basic safety K3</li> <li>Operator alat berat</li> <li>Konstruksi (kayu, batu beton dan baja ringan)</li> <li>Konstruksi beton</li> <li>Instalasi listrik</li> </ol>	Kabupaten Mimika

Nama Balai Latihan Kerja	Program Training	Lokasi
	7. <i>Pipe fitter</i> 8. <i>Welding</i>	
Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Bejana Kasih Bumi Papua	1. Pariwisata-Perhotelan ( <i>Fb Product</i> ) 2. Pariwisata-Perhotelan ( <i>Housekeeping</i> ) 3. Tata Boga-Tata Boga ( <i>Processing</i> )	Kabupaten Mimika
Balai Latihan Kerja Komunitas Ponpes Hidayatullah Timika	Teknologi Komunikasi dan Informasi: 1. <i>Office tools</i> 2. <i>Graphic design</i>	Kabupaten Mimika
Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) Daarul Fikri Nabire	Teknologi Komunikasi dan Informasi: 1. <i>Office tools</i> 2. <i>Graphic design</i>	Kabupaten Nabire

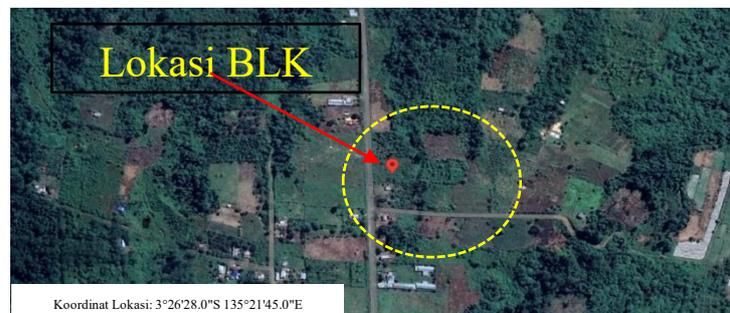
Sumber: <https://kelembagaan.kemnaker.go.id/>



Gambar 2. Lokasi eksisting BLK di Provinsi Papua

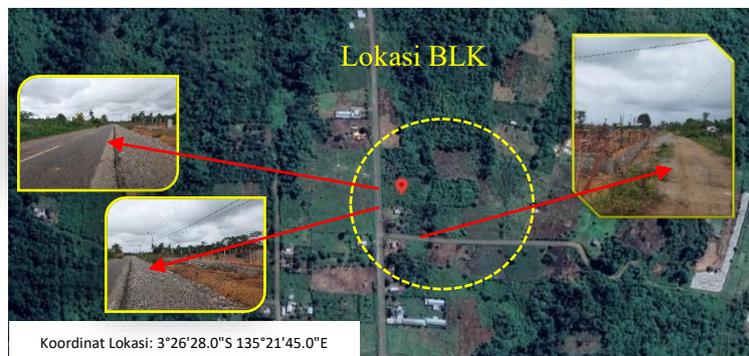
### 3. Data keadaan lingkungan sekitar

Saat ini penggunaan lahan di lokasi rencana pembangunan BLK masih didominasi oleh area lahan terbuka dengan fungsi sebagai kebun campuran. Pada beberapa spot lokasi terdapat rumah penduduk yang mendiami area sekityar lokasi BLK. Terdapat sarana pendidikan pra-sekolah (TK-PAUD), serta sarana ibadah (gereja) pada bagian selatan lokasi BLK. Pada sisi bagian barat terdapat sarana pendidikan berupa SMK, serta sarana pelayanan sosial lain di wilayah ini.



Gambar 3. Lokasi pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK)

BLK Provinsi Papua Tengah telah disediakan dengan luas 10 (sepuluh). Pada pembangunan tahap I akan dimanfaatkan seluas 5 (lima) hektare yang berlokasi Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire. Lahan pembangunan BLK tersebut merupakan lahan yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah. Saat ini lokasi BLK dapat diakses dengan mudah melalui transportasi darat karena dihubungkan oleh Jalan Lokal Primer (Jl. Karadiri II). Kondisi permukaan Jl. Karadiri II beraspal dengan lebar 10 meter. Sebagaimana diatur dalam UU. No. 2 Th. 2002 tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 38 Th. 2004 tentang Jalan, klasifikasi jalan secara umum dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelas, yaitu Jalan Umum dan Jalan Khusus. Dari klasifikasi jalan tersebut, jika dihubungkan dengan kondisi jaringan jalan yang ada di lingkungan sekitar BLK, diketahui bahwa ruas jalan tersebut merupakan Jalan Umum. Jika diklasifikasikan menurut fungsinya, maka ruas jalan di sekitar BLK termasuk dalam klasifikasi Jalan Lokal Primer (JLP), sebagaimana juga telah diatur dalam RTRW Provinsi Papua, bahwa Ruas Jl. Karadiri II adalah Jalan Lokal Primer, yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Nabire.



Gambar 4. Kondisi jaringan jalan di sekitar lokasi BLK

#### D. Analisis Hukum

Pasal 11 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa “Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya melalui pelatihan kerja”. Dengan demikian tenaga kerja dianggap sebagai pelaku (subjek) pembangunan sekaligus juga sebagai tujuan pembangunan, berperan meningkatkan produktivitas nasional dan kesejahteraan masyarakat.

Pada Pasal 12 PP No. 31 Tahun 2006, ditegaskan bahwa pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah yang telah memiliki tanda daftar atau lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memiliki izin dari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. Lembaga pelatihan kerja dapat memperoleh akreditasi dari lembaga akreditasi pelatihan kerja setelah melalui proses akreditasi.

BLK Provinsi Papua Tengah adalah merupakan bangunan gedung negara sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 1 dari Permen PUPR No. 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, disebutkan bahwa Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD, dan/atau perolehan lainnya yang sah. Oleh karena itu dalam

pembangunannya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung negara. Lebih lanjut dinyatakan pada Pasal 3 bahwa Setiap Bangunan Gedung Negara harus memenuhi persyaratan administratif, dan teknis.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa persyaratan pendirian BLK harus memiliki lahan, studi kelayakan, dokumen analisa lingkungan hidup, struktur organisasi, program pelatihan kerja, instruktur dan tenaga pelatihan, serta sarana dan prasarana. Selanjutnya terkait dengan kesiapan lokasi pembangunan BLK diatur pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa lahan untuk pendirian BLK minimal memiliki luas 5.000 m<sup>2</sup>, dan lahan tersebut lahan dimiliki oleh Pemerintah atau pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Kepemilikan lahan dibuktikan dengan sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **E. Analisis Sosial dan Budaya**

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 penduduk di Kabupaten Nabire khususnya di lokasi pembangunan BLK yaitu Distrik Wanggar berjumlah 9.720 jiwa terdiri laki-laki berjumlah 5.048 jiwa dan perempuan berjumlah 4.672 jiwa (BPS Nabire: 2024). Jumlah penduduk tersebut dengan latar berbeda-beda, berbeda dari latar etnis, berbeda dari latar keagamaan dan berbeda pula dalam hal adat istiadat dan kebudayaan. Kondisi seperti itu dapat dipastikan bahwa kehidupan masyarakatnya bercorak majemuk atau beragam etnik yang memiliki latar belakang kehidupan yang berbeda-beda dalam berbagai aspek kehidupan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Papua Tengah memiliki kelayakan yang baik dari aspek sosial budaya jika dilakukan dengan pendekatan yang tepat, melibatkan masyarakat adat, menghormati nilai-nilai lokal, serta menyesuaikan program pelatihan dengan kebutuhan masyarakat akan meningkatkan efektivitas BLK dalam mencapai tujuan peningkatan keterampilan dan kesejahteraan. Dengan demikian, BLK tidak hanya akan menjadi pusat pelatihan tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

### **F. Analisis Ekonomi**

Faktor utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (Arsyad, 1999). Nilai PDRB Papua Tengah, menunjukkan bahwa lapangan usaha sektor pertambangan dan galian merupakan lapangan usaha dengan nilai PRDB terbesar, yaitu 78.342,43 Milyar Rupiah. Sementara itu nilai PDRB terendah adalah lapangan usaha sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang yaitu sebesar 9,50 Milyar Rupiah. Sementara itu nilai PDRB Nasional menunjukkan bahwa lapangan usaha sektor Industri Pengolahan merupakan lapangan usaha dengan nilai PRDB terbesar, yaitu 2.507.799,8 Milyar Rupiah. Sementara itu nilai PDRB terendah adalah lapangan usaha sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang yaitu 10.741,4 Milyar Rupiah.

Komoditas yang menghasilkan nilai  $LQ > 1$  merupakan standar normatif untuk ditetapkan sebagai komoditas unggulan. Namun ketika banyak komoditas di suatu wilayah yang menghasilkan  $LQ > 1$ , sementara yang dicari hanya satu, maka yang harus dipilih adalah komoditas yang mendapatkan  $LQ$  paling tinggi. Karena nilai  $LQ$  yang

semakin tinggi di suatu wilayah menunjukkan semakin tinggi pula potensi keunggulan komoditas tersebut.

Tabel 5. Hasil perhitungan LQ lapangan usaha di Provinsi Papua Tengah tahun 2024

Kode	Lapangan Usaha	Nilai LQ	Keterangan
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.32	Non basis
B	Pertambangan dan Penggalian	10.47	<b>Basis</b>
C	Industri Pengolahan	0.01	Non basis
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.02	Non basis
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	0.11	Non basis
F	Konstruksi	0.54	Non basis
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	0.29	Non basis
H	Transportasi dan Pergudangan	0.28	Non basis
I	Penyediaan Akomodasi dan Makanan Minum	0.07	Non basis
J	Informasi dan Komunikasi	0.25	Non basis
K	Jasa Keuangan	0.14	Non basis
L	Real Estate	0.35	Non basis
M,N	Jasa Perusahaan	0.22	Non basis
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, & Jaminan Sosial Wajib	1.03	<b>Basis</b>
P	Jasa Pendidikan	0.16	Non basis
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	0.32	Non basis
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0.19	Non basis

Berdasarkan perhitungan LQ Lapangan Usaha di Papua Tengah, disimpulkan bahwa terdapat 2 (dua) lapangan usaha yang menjadi basis di wilayah ini, yaitu Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan nilai LQ = 10,47, dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai LQ = 1,03. Dengan demikian dalam rangka pembangunan BLK di Papua Tengah, memiliki peluang pengembangan kejuruan dan sub-kejuruan pada sektor peningkatan keterampilan (*skill*) dalam mendukung pengembangan sektor-sektor ekonomi basis tersebut.

## G. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan teknologi yang pesat mempengaruhi penggunaan teknologi di hampir seluruh aspek kehidupan, peluang kesempatan kerja semakin terbuka bagi masyarakat Indonesia. BLK juga senantiasa bertransformasi mengikuti perkembangan pasar diantaranya dengan menambah metode pembelajaran secara *daring* melalui *platform e-Training*. Standar kompetensi kerja yang diberikan di BLK biasanya dapat diterapkan pada lintas organisasi/perusahaan.

Pendirian BLK Papua Tengah, perlu penguatan mengingat saat ini masih banyak BLK yang kondisinya ketinggalan zaman dan kekurangan instruktur yang memiliki kompetensi industri 4.0. Kendala ini sebenarnya bisa diatasi dengan mengedepankan teknologi simulator. Pelatihan dengan metode simulator lebih efektif, bahkan lebih murah karena tidak menghabiskan material habis pakai untuk pelatihan dengan metode konvensional. Selain itu dengan teknologi simulator untuk situasi yang berbahaya seperti operator alat berat di sektor pertambangan yang mengandung risiko tinggi bisa diatasi dengan metode simulator. Dukungan teknologi yang diaplikasikan di BLK dapat membantu para tenaga pelatihan memperoleh capaian pembelajaran dan kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Yang relevan pada saat ini adalah penggunaan teknologi *virtual reality* (VR) dan *augmented reality* (AR) yang diaplikasikan pada simulator untuk berbagai jenis pekerjaan permesinan, pengelasan, dan berbagai jenis pekerjaan lainnya.

## H. Manajemen

Manajemen pengelolaan BLK Papua Tengah adalah merupakan aspek penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi program pelatihan yang akan diselenggarakan. Pembangunan BLK di Papua Tengah, bertujuan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dan mengurangi angka pengangguran. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dilakukan analisis SWOT yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait pembangunan BLK di Papua Tengah.

Tabel 6. Matriks analisis SWOT kelayakan pembangunan BLK Provinsi Papua Tengah

<b>Kekuatan (<i>Strengths</i>)</b>	<b>Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)</b>
1) Dukungan Pemerintah: Pembangunan BLK didanai oleh Dana Otonomi Khusus dan APBD, menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Tengah. 2) Fasilitas Modern: BLK Papua Tengah dirancang untuk memenuhi standar berdasarkan regulasi, termasuk lahan memadai dan instruktur berkualitas. 3) Peningkatan Keterampilan: BLK berfungsi sebagai pusat pelatihan yang tidak hanya mempersiapkan peserta untuk dunia kerja tetapi juga untuk kewirausahaan, meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.	1) Infrastruktur Awal: Proyek ini masih dalam tahap awal pembangunan, sehingga fasilitas yang tersedia saat ini belum cukup untuk memenuhi kebutuhan pelatihan yang luas. 2) Ketergantungan pada Pendanaan: Bergantung pada dana pemerintah dapat menjadi risiko jika ada perubahan kebijakan atau pengurangan anggaran di masa depan. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Masyarakat mungkin belum sepenuhnya menyadari manfaat dan keberadaan BLK, yang dapat menghambat partisipasi dalam program pelatihan.
<b>Peluang (<i>Opportunities</i>)</b>	<b>Ancaman (<i>Threats</i>)</b>
1) Permintaan Tenaga Kerja Terampil: Dengan meningkatnya kebutuhan akan tenaga kerja terampil di berbagai sektor, BLK dapat berperan penting dalam memenuhi permintaan tersebut. 2) Kerjasama dengan Sektor Swasta: Peluang untuk menjalin kerjasama dengan industri lokal dapat meningkatkan relevansi program pelatihan dan memfasilitasi penyerapan tenaga kerja. 3) Program Pelatihan Berbasis Kompetensi: Mengembangkan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar dapat menarik lebih banyak peserta dan meningkatkan daya saing.	1) Persaingan dengan Lembaga Pelatihan Lain: Adanya lembaga pelatihan lain yang mungkin menawarkan program serupa dapat mengurangi jumlah peserta di BLK. 2) Perubahan Kebijakan Pemerintah: Kebijakan baru terkait ketenagakerjaan atau pendidikan dapat mempengaruhi operasional dan tujuan BLK. 3) Tingkat Pengangguran yang Masih Tinggi: Meskipun BLK bertujuan untuk mengurangi pengangguran, tingkat pengangguran yang tinggi dapat menjadi tantangan dalam mencapai hasil yang diinginkan.

Berdasarkan potensi sumber daya, serta permasalahan ketenagakerjaan di wilayah Provinsi Papua Tengah, maka pembangunan BLK Provinsi Papua Tengah memerlukan pertimbangan terhadap kebutuhan dan potensi lokal. Pembukaan kejuruan di BLK Provinsi Papua Tengah harus mempertimbangkan potensi lokal serta kebutuhan pasar kerja. Dengan fokus pada pertanian, perikanan, teknik, industri kreatif, teknologi informasi, dan kesehatan, BLK dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan keterampilan masyarakat dan pengurangan angka pengangguran di daerah tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2024, Papua Tengah memiliki 840,21 ribu angkatan kerja, dengan mayoritas bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta 88,20 persen di sektor informal. Penduduk Papua Tengah berjumlah 1.416.787 jiwa dan diproyeksikan mencapai 1.901.051 jiwa pada tahun 2043. Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) direncanakan di Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, sebagai pusat pemerintahan provinsi, dengan mempertimbangkan aspek sosial budaya masyarakat. Dari sisi ekonomi, sektor pertambangan dan penggalian memiliki kontribusi PDRB terbesar yaitu sebesar 78.342,43 Milyar Rupiah sementara sektor pengadaan air dan pengelolaan limbah memiliki kontribusi terkecil yaitu 9,50 Milyar Rupiah. Lapangan usaha yang menjadi basis adalah Sektor Pertambangan dan Penggalian dengan nilai LQ = 10,47, dan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai LQ = 1,03. Pembangunan BLK bertujuan meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui *e-learning*, fasilitas modern, serta pelatihan *soft skills*. Pengelolaan BLK yang efektif memerlukan perencanaan program, pelaksanaan pelatihan, pengelolaan sumber daya manusia, serta koordinasi yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aldy, R., Riawan, P., & Sugianto, L. O. (2017). *Studi Kelayakan Bisnis*. Ponorogo: Unmuh Ponorogo Press.
- Aneta, Y., & Podunge, A.W. (2022). Peran unit pelaksana teknis balai latihan kerja dalam mengendalikan tingkat pengangguran di Kabupaten Bone Bolango. *MANOR Jurnal Manajemen dan Organisasi Review*. 4(1), 40-44.
- Atmadja, A, P, S. (2008). *Studi Kelayakan, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Tengah. (2024). *Keadaan Ketenagakerjaan Papua Tengah*. Nabire: Provinsi Papua Tengah. Badan Pusat Statistik.
- Ichsan, I. (2014). *Profil & Tantangan Balai Latihan Kerja (BLK) di Provinsi Aceh*. Aceh: SEFA Bumi Persada.
- Khasanah, A., Suprihanto, J., & Novitasari, D. (2021). Analisis pra kelayakan usaha kelompok tenaga kerja mandiri "Dahlia Fashion" di Desa Bandung Kecamatan Pecalungan Kabupaten Batang. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*, 1(1), 143-157. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v1i1.343>.
- Nurfauzil, I. N., Winarni, W., Zulfadli, Z., Pratiwi, D, K, N., & Ardivia, A, D, R. (2018). Analisis studi kelayakan usaha UMKM Kaldu Bubuk Kepiting, *Prosiding Sembadha*, 1(1), 164-164.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Balai Latihan Kerja.
- Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
- Purwana, P., & Hidayat, H. (2016). Analisis studi kelayakan bisnis pada SK computer melalui aspek finansial dan aspek non finansial. *eBisnis Manajemen*, 1(4), 65-72. <https://doi.org/10.59603/ebisman.v1i4.232>.
- Putri, B, F., Yuliarso, H., & Mustaqimah, U. (2017). Strategi perencanaan dan perancangan redesain Balai Latihan Kerja Kota Surakarta. *ARSITEKTURA Jurnal Ilmiah Arsitektur dan Lingkungan Binaan*. 15(1), 277-278. <https://doi.org/10.20961/arst.v15i1.12184>.
- Sulastri, L. (2016). *Studi Kelayakan Bisnis Untuk Wirausaha*. Jakarta: LGM - LaGood's Publishing.
- Suliyanto, S. (2012). *Studi Kelayakan Bisnis*. Yogyakarta: Andi.
- Sumodiningrat, G. (2011). *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syawal, L, M., Hidayat, M., & Latief, F. Analisis kelayakan pengembangan usaha "Laode Galeri" di Makassar. *JBK Jurnal Bisnis & Kewirausahaan*. 9(1), 19-20. <http://dx.doi.org/10.37476/jbk.v9i1.859>.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bab 5 pasal 18 ayat 1 dan pasal 23 tentang Ketenagakerjaan.